

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
<i>Executive Summary</i>	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM	2
1. <i>Letak Geografis</i>	2
2. <i>Pembagian Wilayah Administratif</i>	2
3. <i>Organisasi Perangkat Daerah</i>	2
4. <i>Sumber Daya Manusia Aparatur</i>	6
5. <i>Sarana dan Prasarana Organisasi</i>	6
D. DASAR HUKUM	7
E. SISTEMATIKA.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	10
1. <i>VISI</i>	11
2. <i>MISI</i>	11
3. <i>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM</i>	12
B. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
1. <i>Perbandingan Target dan Realisasi</i>	20
2. <i>Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, 2013 dan Tahun 2012</i>	22
3. <i>Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah</i>	23
4. <i>Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan</i>	23
5. <i>Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	24
B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN.....	25
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	50

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Malang.

LAKIP Dinas Pendapatan Daerah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, 08 Pebruari 2016

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19681017 199203 006

Executive Summary

Fulfilling the mandate of Presidential Instruction No. 7 of 1999 On Accountability PERFORMANCE Government (AKIP) that require Government Agencies as Operator sure the Government gatra , to review account for the Implementation of the principal tasks and functions well as the authority and wisdom , then drafted Accountability PERFORMANCE Government Agencies (LAKIP) Department of Revenue the area serves as a medium of Liability , referring shown to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 CONCERNING THE PERFORMANCE Determination Guidelines for the Preparation and Accountability PERFORMANCE . Besides IT , LAKIP Also the Department of Revenue Requirement For Malang hearts analysis and evaluation costs hearts Frame

LAKIP Regional Revenue Office Malang Year 2015 presents various successes and failures in the field of local tax revenue . The success in local tax revenue is certainly not only the success of the Regional Revenue Office Malang alone , but also illustrates the success and the support and participation of the taxpayer and collector PAD SKPD of Malang in general . In addition , this report formed also present data and information relevant to the needs of decision makers in order to interpret the successes and failures of the broader and deeper.

2015 is the second year of implementation of the Strategic Plan Revenue Service Malang in 2013-2018 . Vision , Mission , Objectives , and Targets have been developed based on RPJMD Malang as can be seen in the chart below:

Vision , Mission , Goals, Objectives referring to the RPJMD Malang

VISION : Local Tax Revenue Increases for Public Welfare			
MISSION : Increase Tax Revenue Region through Intensification and Extensification of Local Taxes			
GOAL	TARGET	STRATEGY	POLICY
1. Increasing Local Tax Revenue	1. Increasing Local Tax Revenue 2. Increased Local Tax Collection Service Quality; 3. Efficient management of Regional Tax revenue	1. Intensification of Local Tax Revenue	- Improving the quality of tax authorities ; - Completion of Regional Tax Administration ; - Improved regulation of Local Tax .
		2. Extensification Local Tax Revenue	- Expansion of Tax Object ; - Expansion of the taxpayer ; - Completion of the fare.

Based on the calculation of the gains described in Performance Measurement , can you explain more about the achievement of performance in 2015 with a medium-term target in the Strategic Plan document as follows :

Achievement of performance in 2015

NO	TARGET	INDICATOR TARGET	TARGET 5 OF	REALIZATION 2015
1.	Increasing Local Tax Revenue	1. Achievement of Local Tax Revenue 2. % Increase Local Tax 3. % Decrease arrears Local Taxes	100% 10% 5%	116.48% 13.33% -22.20%
2.	Increased Local Tax Collection Service Quality	The value of community satisfaction survey	81.3	76.20
3.	Efficient management of Regional Tax revenue	Cost to income ratio Local Tax	<10%	12.82%

In general , the measurement of performance achievement in 2015 showed that the level of achievement in 2015 has exceeded the target even though there are some things that decrease is the aspect of tax receivables growing area.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2015 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2015 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Malang adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama kurun waktu tahun anggaran 2015 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 sebagai bahan pengambilan kebijakan, penyusunan pengambilan rencana

program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, memiliki wilayah seluas 110,06 km², terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan.

Kota Malang terletak pada koordinat 7.06 – 8.02 Lintang selatan dan 112.07 Bujur Timur dengan ketinggian antara 339 – 662,5 meter dari permukaan laut. Karena letaknya cukup tinggi, kondisi iklim kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7 C sampai 25.1 C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7 C dan suhu minimum 18,4 C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% sampai 86%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40% serta curah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Kondisi iklim demikian membuat kota Malang relatif sejuk dibandingkan daerah-daerah lain.

2. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif daerah kota Malang berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Malang yaitu :

Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pembagian wilayah administratif di kota Malang adalah:

- Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 125 RW, 889 RT
- Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 847 RT
- Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 89 RW, 831 RT
- Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 119 RW, 751 RT

3. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Pendaftaran
 - c. Seksi Penetapan
4. Bidang PBB, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
 - b. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
 - c. Seksi Pengolahan Data
5. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah lainnya
 - c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya
6. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengembangan Potensi
 - c. Seksi Pengelolaan Benda Berharga
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksana kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- j. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- k. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- l. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m. Pelaksanaan pemungutan Penerimaan bukan Pajak;
- n. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya;
- o. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- x. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;
- z. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dilihat pada lampiran 1.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II/b, membawahi seorang Sekretaris dengan eselon III/a dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan Eselon III/b, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi dengan Eselon IVa.

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang bisa dilihat pada lampiran 2.

5. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didukung dengan sarana dan prasarana antara lain seperti :

- a. Komputer 5 Unit
- b. Notebook 2 Unit
- c. Printer 15 Unit
- d. Videotron 1 Unit
- e. Almari Arsip 2 Unit
- f. Distometer 4 Unit

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana terlampir pada Daftar Inventaris barang Dinas Pendapatan Daerah sampai dengan Desember 2015 yang disajikan pada lampiran 5.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
17. Perwal Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

E. SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Letak Geografis
 2. Pembagian Wilayah Administrasi
 3. Organisasi Perangkat Daerah
 4. Sumber Daya Manusia Aparatur
 5. Sarana dan Prasarana Organisasi
 6. Capaian Kinerja Tahun 2014
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Visi
 2. Misi

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi
2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, 2013 dan Tahun 2012
3. Perbandingan realisasi kinerja 2015 dengan target jangka menengah (Tahun 2018)
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian program/kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk periode lima tahun. Rencana strategi Dinas Pendapatan Daerah 2013-2018 memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagaimana terlampir di lampiran 2, tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah 2013-2018.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indicator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut :

1. VISI

Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 harus dicapai pada tahun 2015. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Malang, maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah merumuskan visi sebagai berikut:

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MALANG

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna

mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah, tujuan yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.**

b. Sasaran

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah, terdapat 3 (tiga) sasaran, sebagai berikut:

- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
- Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah

c. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah;
- 2) Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah;

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Peningkatan mutu fiskus;
- 2) Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah;
- 3) Penyempurnaan regulasi Pajak Daerah;
- 4) Perluasan Objek Pajak;
- 5) Perluasan Wajib Pajak;
- 6) Penyempurnaan tarif.

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah tahun 2015 sebagai implementasi misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d) Penyediaan alat tulis kantor

- e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i) Penyediaan makanan dan minuman
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k) Pawai Pembangunan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- a) Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- e) Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- b) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

4) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan :

- a) Sensus Potensi Wajib Pajak Daerah
- b) Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)
- c) Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)
- d) Pengolahan data dan penagihan piutang PBB
- e) Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah

- f) Kajian sensus pajak daerah
- g) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima
- h) Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah
- i) Gebyar Sadar Pajak
- j) Kegiatan pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online
- k) Kegiatan supervisi, pendampingan dan pengembangan pajak online pajak daerah
- l) Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah
- m) Kajian Penetapan Target Pajak Daerah
- n) Intensifikasi penerimaan PBB
- o) Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang
- p) Pengelolaan Benda-Benda Berharga
- q) Pembukuan dan Pelaporan
- r) Kajian Administrasi Pajak Daerah

5) Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu

Kegiatan :

- a) Survalance Audit ISO 9001-2008 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Adapun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015 lebih lanjut disajikan dalam lampiran 3. Pada aktualisasinya, 3 sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015 tercapai secara keseluruhan, dan kesemuanya telah terangkum di dalam Rencana Strategis. Demikian pula untuk pencapaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 37 kegiatan, untuk lebih jelasnya diuraikan pada bab 3 pembahasan, serta form pengukuran kinerja kegiatan pada lampiran 4.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015 dan kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan indikator kinerja utama (indikator kinerja sasaran) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerjaterukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibuat sampai level pejabat struktural eselon IV sebagai bukti komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Perjanjian kinerja eselon III dan IV menggambarkan outcome dan output dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Pemerintah Kota Malang melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Malang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Adapun Indikator Kinerja pada Dinas Pendapatan Kota Malang adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kota Malang

No	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pajak Daerah}}{\text{target Pajak Daerah}} \times 100 \%$
		- % Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}}{\text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$
		- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	$\frac{\text{Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x)}}{\text{tunggakan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	$\frac{\text{Total jumlah belanja}}{\text{Jumlah penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2015 sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Sasaran :

a. Capaian Penerimaan Pajak Daerah

Capaian Penerimaan Pajak Daerah bermanfaat untuk menentukan strategi kebijakan dalam memungut Pajak Daerah.

Angka penerimaan Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 116.48%. Penerimaan Pajak Daerah dengan capaian 116.48% termasuk kategori sangat berhasil yang berasal dari perhitungan rencana Rp.272.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 316,814,967,743.76 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun macam Pajak Daerah sebanyak 9 pajak yang meliputi:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Penerangan Jalan;
- 5) Pajak Parkir;
- 6) Pajak Air Bawah Tanah;
- 7) Pajak Reklame;

- 8) Pajak BPHTP (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB).

Berikut ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah yang disajikan tiap Pajak Daerah yaitu :

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	22,131,094,351.27	31,828,508,228.43	143.82
2	Pajak Restoran	28,476,534,584.04	39,071,320,184.22	137.21
3	Pajak Hiburan	4,943,004,465.24	6,031,213,792.94	122.02
4	Pajak Penerangan Jalan	40,602,101,561.92	45,805,478,131.18	112.82
5	Pajak Parkir	2,501,998,407.60	3,662,965,828.90	146.40
6	Pajak Air Bawah Tanah	749,475,964.90	777,523,080.54	103.74
7	Pajak Reklame	18,676,522,723.99	19,557,043,020.32	104.71
8	Pajak BPHTB	100,050,000,000.75	111,466,125,751.23	111.41
9	Pajak PBB	53,869,267,940.29	58,614,789,726.00	108.81
JUMLAH		272,000,000,000.00	316,814,967,743.76	116.48

b. % Peningkatan Pajak Daerah

% peningkatan Pajak Daerah dihitung dengan formula indikator Penerimaan pajak daerah tahun 2015 dikurangi penerimaan pajak daerah tahun 2014 dibagi penerimaan pajak daerah tahun 2014 adalah sebesar 13,33%.

c. % Penurunan tunggakan Pajak Daerah

% penurunan tunggakan Pajak Daerah dihitung dengan formula indikator Tunggakan pajak daerah tahun 2014 dikurangi tunggakan pajak daerah tahun 2015 dibagi tunggakan pajak daerah tahun 2014 adalah sebesar -22.20%

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

Indikatornya adalah Nilai survey kepuasan masyarakat

Nilai kepuasan masyarakat dihasilkan dari pengukuran survey kepuasan masyarakat. Adapun hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat Tahun 2015 adalah 76,20.

Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik dan masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Sasaran 3 : Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah

Indikatornya adalah rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah dihitung dengan formula Total jumlah belanja dibagi Jumlah penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar 12.82%.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, 2014, 2013 dan Tahun 2012

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014, 2013, dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
126.63%	113.42%	107.26%	116.48%

Ikhtisar pertumbuhan capaian penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, 2013, dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	126.63%	113.42%	107.26%	116.48%
	- % Peningkatan Pajak Daerah	26.96%	49.88%	16.48%	13.33%
	- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	-	-	-7.88%	-22.20%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	81.63	77.62	83.22	76,20
3. Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	5.93%	7.70%	7.54%	12.82%

3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Misi Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian 2015	Capaian 2018
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	116.48%	100%
	- % Peningkatan Pajak Daerah	13.33%	10%
	- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	-22.20%	5%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	76,20	81.30
3. Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	<10%	12.82%	<10%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2015 ini mencapai 116,48%. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100% tiap tahunnya. Sedangkan bila dilihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah, kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2015 ini lebih kecil yaitu 13,33% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 16,48%.

Keberhasilan Dispenda kota Malang dalam memungut pajak tahun 2015 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka penerimaan pajak daerah diantaranya penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, dan penagihan.

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus Tax performance index (TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama Dispenda Kota Malang). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh.

Keberhasilan maupun kegagalan setiap organisasi untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada baik sumber daya berupa personil maupun dari segi pendanaan. Personil Dispenda Kota Malang pada tahun 2015 keseluruhan berjumlah 182 orang. Efisiensi sumber daya dari segi personil belum bisa terukur karena analisis jabatan dan analisis beban kerja masih dalam tahap proses penyusunan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil dari

pengukuran tersebut didapat angka 12,82% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar <10%.

Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Dispenda Kota Malang dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif namun kurang Efisien.

B. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Kota Malang adalah ditargetkan sebesar Rp.40,637,248,991.86 dengan realisasi sebesar Rp.36,767,694,057.00 atau 90,48% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp.23,989,990,541.86 dengan realisasi sebesar Rp.22,539,693,939.00 atau 93,95% dan Belanja Langsung sebesar Rp.16.647.258.450.00 dengan realisasi sebesar Rp.15,204,405,106.00 atau 91.33%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah

RINCIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung	23,989,990,541.86	22,539,693,939.00
Belanja Pegawai	23,989,990,541.86	22,539,693,939.00
2. Anggaran Belanja Langsung	16,647,258,450.00	15,204,405,106.00
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,322,586,300.00	3,946,700,656.00
1) Penyediaan jasa surat menyurat	196,383,000.00	182,236,200.00
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,063,800,000.00	988,150,988.00
3) Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,553,700.00	21,018,700.00
4) Penyediaan alat tulis kantor	81,023,000.00	78,059,950.00

5) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	96,678,950.00	88,849,350.00
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,296,050.00	11,746,000.00
7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,314,352,000.00	1,241,170,000.00
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9,999,600.00	9,999,600.00
9) Penyediaan makanan dan minuman	148,500,000.00	23,292,500.00
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000.00	302,772,380.00
11) Pawai Pembangunan	25,000,000.00	23,000,000.00
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,905,846,000.00	1,512,582,800.00
1) Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office	100,000,000.00	96,410,000.00
2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	173,865,000.00	172,189,000.00
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	637,581,000.00	359,193,800.00
4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	44,400,000.00	44,400,000.00
5) Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah	950,000,000.00	840,390,000.00
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	171,992,000.00	133,063,000.00
1) Penyusunan laporan keuangan semesteran	95,937,000.00	90,383,000.00
2) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	76,055,000.00	42,680,000.00
d. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11,146,834,150.00	9,518,061,650.00
1) Sensus Potensi Wajib Pajak Daerah	650,000,000.00	639,182,000.00
2) Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)	554,955,500.00	244,384,900.00
3) Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)	2,316,224,700.00	2,123,852,200.00
4) Pengolahan data dan penagihan piutang PBB	635,936,000.00	501,150,000.00
5) Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah	340,223,000.00	185,688,950.00
6) Kajian sensus pajak daerah	152,742,500.00	133,820,000.00
7) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima	792,257,500.00	686,467,500.00
8) Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah	297,500,000.00	270,338,600.00
9) Gebyar Sadar Pajak	549,250,000.00	540,705,500.00
10) Kegiatan pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online	400,000,000.00	168,150,000.00

11) Kegiatan supervisi, pendampingan dan pengembangan pajak online pajak daerah	150,000,000.00	98,890,000.00
12) Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah	180,000,000.00	170,963,500.00
13) Kajian Penetapan Target Pajak Daerah	50,000,000.00	48,594,000.00
14) Intensifikasi penerimaan PBB	3,138,343,450.00	2,914,114,300.00
15) Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang	629,976,500.00	522,235,100.00
16) Pengelolaan Benda-Benda Berharga	55,500,000.00	44,557,300.00
17) Pembukuan dan Pelaporan	55,500,000.00	46,119,800.00
18) Kajian Administrasi Pajak Daerah	198,425,000.00	178,848,000.00
e. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	100,000,000.00	93,997,000.00
1) Survalance Audit ISO 9001-2008	100,000,000.00	93,997,000.00

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa aktifitas surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar ke Dinas/Instansi lain. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.196,383,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 182,236,200.00 atau 93%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 1 premi asuransi untuk 13 unit mobil dan 53 unit sepeda motor. Sedangkan hasil dari kegiatan ini yaitu terselesaikannya administrasi perkantoran. Alokasi anggaran sebesar Rp. 63.443.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.744.300.00.

Permasalahan dari kegiatan tersebut adalah minimnya SDM yang menangani surat menyurat. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu diberikannya tambahan tenaga administrasi yang menguasai komputer untuk memperlancar kegiatan surat-menyurat.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pemberitaan/penyiaran melalui media cetak, elektronik, maupun online. Menggunakan dana sebesar Rp.1,063,800,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 988,150,988.00 atau 93% karena disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 tahun.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemberitaan/penyiaran dan informasi perpajakan daerah melalui media cetak, elektronik, maupun online :

- 1 Media cetak lokal mandiri. Alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 190.000.000.00 . Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal mandiri dengan oplah 40.000 Eks. Secara lancar. Dilaksanakan oleh PT. MALANG POS CEMERLANG Jl. Sriwijaya No. 1-9 Malang.
- 1 Media cetak lokal berjaring regional bertema umum dan informal. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal berjaring regional dengan oplah 6.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT MALANG EKSPRES CEMERLANG Ruko Sawojajar Mas Cluster Apple No. 1-9 Malang.
- 1 Media cetak lokal bertema umum segmentasi menengah kebawah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak lokal umum segmentasi menengah kebawah oplah 8.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT. MEMORANDUM SEJAHTERA Ruko Istana Dinoyo Jl. M.T. Haryono 1A No. 6 Malang.
- 1 Media cetak nasional berbasis bisnis. Alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000.00 dengan realisasi Rp. 80.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media cetak nasional bertema bisnis oplah 3.000 Eks. Dilaksanakan oleh PT. JURNALINDO AKSARA GRAFIKA Jl. Mas Mansyur No. 12A Jakarta Pusat.
- 2 Media Radio Lokal. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media radio lokal. Dilaksanakan oleh PT. RADIO MITRA ADI SWARA Jl. Dr. Cipto No.16 Malang.

- 1 Media televisi lokal jaringan regional. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media televisi lokal jaringan regional. Dilaksanakan oleh PT. JANNAH BATU TELEVISI Ruko Tlogomas Square Kav. 31 Jl. Raya Tlogomas No. 23 Malang.
- 1 Media Televisi lokal mandiri bertema umum. Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 60.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran media televisi lokal mandiri bertema umum. Dilaksanakan oleh PT. MALVETE Jl. Puncak Joyo Agung Malang.
- 1 Media cetak regional dengan oplah 25.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pemberitaan/pemberitaan media cetak regional di kota malang. Dilaksanakan oleh PT. ANTAR SURYA MEDIA Jl. Rungkut Industri No.68-70 SURABAYA.
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media online. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberitaan/penyiaran media online. Dilaksanakan oleh PT. DAWAI CITRA SEMESTA Jl. Raya Dieng 27A Malang.
- 1 Paket pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media cetak lokal berjaring nasional dengan oplah 50.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 190.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya media cetak lokal berjaring nasional. Dilaksanakan oleh PT. MALANG INTERMEDIA PERS Jl. Arjuno 23 Malang.
- 1 Paket Pengadaan Belanja Jasa Pemberitaan/Penyiaran Media Cetak Regional Bertema Birokrasi dengan Oplah Malang Raya 5.000 Eks. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya

penyiaran iklan dimedia cetak. Dilaksanakan oleh PT. HARIAN BHIRAWA Jl. Indragiri 73 Sawunggaling Wonokromo Surabaya.

- 1 Paket Pengadaan Belanja Jasa Pemberitaan/Penyiaran Media Televisi Lokal Mandiri Bertema Edukasi dan Syiar. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberitaan/penyiaran melalui media televisi. Dilaksanakan oleh PT. BATU TV Jl.TVRI Dusun Dresel Oro-Oro Ombo Batu.
- 1 Paket Pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media radio lokal. Alokasi anggaran yaitu Rp. 20.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya siaran spot himbauan,sosialisasi,terkait pajak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. RADIO KHARISMA DIAN SUARA (KDS8) Jl. Raya Langsep Barat Kav.30. Malang.
- 1 Paket Pengadaan belanja jasa pemberitaan/penyiaran media online. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya iklan advetorial dan scrool kiri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. MALANG VOICE SEJAHTERA Jl. Danau Kerinci VIII Blok A1-D Malang.

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, untuk alokasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp.21,553,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 21,018,700.00 atau 98% disebabkan menyesuaikan kebutuhan.

Keluaran dari kegiatan ini tersedianya alat-alat kebersihan, dengan hasil dari kegiatan ini kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam keadaan bersih.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan administrasi surat menyurat. Alokasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp.81,023,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.78,059,950.00 atau 96%.

Adapun keluaran dari kegiatan ini berupa tersedianya 60 jenis alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.123.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.159.950.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Dilaksanakan oleh CV. PUTRI HARAPAN Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 134 Malang.

5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kegiatan ini merupakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp.96,678,950.00 dengan realisasi sebesar Rp. 88,849,350.00 atau 92%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 17 jenis barang cetakan dan penggandaan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 79.291.950 dengan realisasi sebesar Rp. 71.862.450.00. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Dilaksanakan oleh CV. ERA GUNA KARYA Jl. Dsn. Prambatan Rt.04 Rw.01 Ds. Gunungsari Kec Bumiaji Kota Batu.

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan alat-alat listrik yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan operasional kantor. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.15,296,050.00 dengan realisasi dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 11,746,000.00 atau 77%.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat listrik sesuai kebutuhan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat-alat listrik sesuai kebutuhan.

7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan keperluan peralatan dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1,314,352,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,241,170,000.00 atau 94%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1 jenis belanja modal pengadaan alat-alat studio 1 paket. Alokasi anggaran sebesar Rp. 117.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 113.775.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan studio di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. CREATIVE PRO SEMUA Jl. Perum Permata Regency Blok 24 No. 22 Karangploso Kabupaten Malang.
- 8 jenis belanja modal pengadaan komputer 1 paket. Alokasi anggaran sebesar Rp. 158.196.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 156.997.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan komputer di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. FAM JAYA Jl. Bunga Kana No. 12 Malang.
- 1 paket belanja modal pengadaan software. Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.00. dengan realisasi sebesar Rp. 97.400.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya software Aplikasi SMS gateway di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. ARTA MANDIRI KONSULINDO Jl. Pesona Mutiara Tidar II BA-38 Karangwidoro Kec. Dau Kabupaten Malang.
- 3 jenis belanja modal pengadaan peralatan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.900.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. BAROKAH Jl. Kebalen Wetan III B/2 Malang.
- 1 paket belanja modal pengadaan software. Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.00. dengan realisasi sebesar Rp. 97.800.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya software aplikasi sinkronisasi data pembayaran PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DEENHA SOLUTION Dsn Kembangore RT.05/RW.04 Ds Karangtalun Kec. Kras Kabupaten KEDIRI.
- 1 paket belanja modal pengadaan atribut patroli mobil pajak. Alokasi anggaran Rp. 50.000.000.00 dengan realisasi sebesar

- Rp. 44.151.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan atribut patroli mobil pajak kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Raya Pandanlandung No. 90 Malang.
- 120 stel pengadaan pakaian dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian dinas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. KRSNA UTAMA Jl. Danau Sentani Utara IV H3 L6 Malang.
 - 8 jenis belanja modal pengadaan peralatan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 154.079.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 151.822.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. RUAS BUMBU Jl. Ade Irma Suryani Timur No. 14 Malang.
 - 1 pengadaan belanja modal pengadaan kelengkapan alat-alat komunikasi (penyempurnaan videotron). Alokasi anggaran sebesar Rp. 183.768.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 182.975.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyempurnaan videotron secara maksimal. Dilaksanakan oleh CV. SAUDARAKU JAYA Jl. Kanjuruhan II/10 Malang.
 - 1 Paket pengadaan belanja modal pengadaan komputer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 114.300.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 112.500.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan komputer di Dinas Pendapatan Daerah kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. CIPTA INDAH ABADI Jl. Wonocolo 44 Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya.
 - 1 Paket pengadaan Box peralatan elektronik. Alokasi anggaran sebesar Rp. 52.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Box untuk peralatan elektronik di Dinas Pendapatan Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. KREATIF PRO SEMUA Perum Permata Regency Blok 16 No.88 Desa ngijo Karangploso Kabupaten Malang.

- 1 Paket pengadaan belanja alat ukur kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 205.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 186.100.000.00. Hasil dari kegiatan ini adalah agar lancarnya kegiatan pelaksanaan diDinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. KARSA PUTRA JAYA Jl. Bunga Kana No.10 Malang.

8) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini merupakan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan untuk karyawan/wati. Anggaran yang dialokasi sebesar Rp.9,999,600.00 dan realisasi dalam kegiatan ini sebesar Rp. 9,999,600.00 atau 100 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa surat kabar/majalah. Sedangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

9) Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kegiatan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat. Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp.148,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 23,292,500.00 atau 16%.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

10) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan ini menghadiri kunjungan rapat/koordinasi yang diadakan didalam kota, luar kota dan luar propinsi. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp.350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 302,772,380.00 atau 87% dikarenakan adanya upaya untuk lebih selektif memilih undangan-undangan rapat koordinasi dan rapat ke luar daerah sehingga hanya menghadiri undangan sesuai kepentingan.

Keluaran dari kegiatan ini berupa pelaksanaan rapat konsultasi dalam daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

11) Pawai Pembangunan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Pawai Pembangunan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.000.000,00 atau 92%.

Keluaran dari kegiatan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tgl 26 April 2015 dan 19 Agustus 2015 masing-masing senilai Rp. 11.500.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi perpajakan melalui pawai pembangunan. Dilaksanakan oleh CV. RUAS BAMBU Jl. Ade Irma Suryani Timur 14 RT.003 RW.006 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang.

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1) Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office

Kegiatan ini untuk menumbuhkan semangat kinerja pegawai dan secara teknis terlaksananya perencanaan pembangunan gapura zona integritas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 96,410,000,00 atau 96%. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembangunan gapura zona integritas di lingkungan Dinas pendapatan daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayj. Panjaitan No.2 Malang.

2) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara secara rutin/berkala gedung dan bangunan kantor PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1 Jalan Mayjen Sungkono Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 173,865,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 172,189,000,00 atau 99%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 1 buku laporan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan bangunan pelayanan PBB. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan pelayanan PBB

dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. TIRTA JAYA Jl. Klayatan III/14 RT.02/RW.02 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang.

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini berupa pelaksanaan service mobil dan motor, penggantian suku cadang mobil, dan belanja BBM. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.637,581,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 359,193,800.00 atau 56%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa service 13 unit mobil, service 53 unit sepeda motor, dan belanja BBM 16,278 liter. Hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan dinas/operasional yang terawat.

4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara secara rutin peralatan dan mesin pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1 Jalan Mayjen Sungkono Malang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.44,400,000.000 dengan realisasi sebesar Rp.44,400,000.000 atau 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan dan mesin. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah peralatan dan mesin kantor dalam keadaan baik

5) Pembangunan gudang arsip Pajak Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya teknis perencanaan pembangunan gudang arsip pajak 2015. Alokasi anggaran sebesar Rp. 950,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 840,390,000.00 atau 88%.

- Dengan alokasi anggaran Rp. 21.700.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.500.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Jasa Konsultan Perencanaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2015.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. MULIA JAYA MAKMUR Perum Tunjung Tirto Semarak C 62 Kec. Singosari Kabupaten Malang.

- 1 Paket Belanja modal pengadaan gudang arsip pajak daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 871.300.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 780.300.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya gedung gudang arsip di Dinas Pendaoatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Pandan Landung 90A Wagir Kab. Malang.

- 1 Paket Belanja jasa konsultasi supervisi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.790.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersampainya laporan bulanan, laporan invoice dan laporan dokumentasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. SINAN JI. Janti Barat I-27 Malang.

c. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan semesteran. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.95,937,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 90,383,000.00 atau 94 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa buku laporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi.

2) Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 76,055,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 42,680,000.00 atau 56 %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu 1 paket Jasa Konsultansi Perencanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.875.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu untuk terlaksananya Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dilaksanakan oleh CV. DC GLOBALINDO Jl. Simpang Pakisaji no. 88 Ds. Pakisaji Kabupaten Malang.

d. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Sensus Potensi Wajib Pajak Daerah

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.650,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 639,182,000.00 atau 98 %.

Keluaran dari kegiatan ini berupa :

- 1 Paket belanja konsultasi penelitian. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 613.525.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 609.620.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penelitian sensus potensi wajib Pajak Daerah. Dilaksanakan oleh CV. CITIPLAN Jl. Tlogomas III/26 Malang.

2) Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non PBB)

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 554,955,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.244.384.900,00 atau 44.04%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa :

- 3 paket belanja jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 42.900.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya dokumentasi iklan layanan masyarakat pajak daerah non PBB. dilaksanakan oleh CV. CAKRAWALA CREATIVE Jl. Kyai Parseh No. 41 Malang.

3) Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.2,316,224,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,123,852,200.00 atau 91.69%.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- Tersedianya 29 jenis belanja bahan material barang perlengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 53.200.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya barang perlengkapan kantor di Dinas Pendapatan Kota Malang. Dilaksanakan oleh PT. GANINDRA SEMESTA Puri Nirwana Simandaran Kav. 4 Sekarpuro Pakis Kabupaten Malang.
- Tersedianya 2 jenis barang cetakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.347.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.675.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayjen Panjaitan 2C Malang.

- 500 buah belanja pakaian olah raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.250.000.00. Hasil dari kegiatan yaitu tersedianya pakaian olah raga di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Raya Pandanlandung RT.13/RW.03 Kec. Wagir Kabupaten Malang.
- 725 buah belanja jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 172.187.500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 171.607.500.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya piagam dan pigura pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayjen Panjaitan 2C Malang.
- 1 Paket belanja penyelenggaraan event. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000.00. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan pelaksanaan tax on mall Tahap I. Dilaksanakan oleh CV. MAXIMA CIPTA SEJAHTERA Jl. Sidomakmur No. 64 sengkaling Kabupaten Malang.
- 26 Jenis barang cetakan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 348.313.300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 269.206.100.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetakan di Dinas Pendapatan Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. JADE INDOPRATAMA Jl. Tumenggung Suryo 35 Malang.
- 75 Jenis Belanja Pengadaan alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 104.510.900.00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.573.400.00. Hasil dari kegiatan ini lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. EL MAIN JAYA Jl. Nakula 43 Tumpang Kab. Malang.

4) Pengolahan data dan penagihan piutang PBB

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.635,936,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.501,150,000.00 atau 78.81%.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- 600 unit belanja bahan/material patok. Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.100.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 185.100.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya patok pengaman di

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. SIDCOM JAYA Perum Muara Sarana Indah H-17 Ds. Mulyoagung Kec. DAU Kabupaten Malang.

- 3600 buah belanja cetak (stiker). Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.600.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.800.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya cetak stiker. Dilaksanakan oleh CV. ELMAIN JAYA Jl. Nakula No. 43 Tumpang Kab. Malang.
- 3 paket pengadaan belanja Jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 42.900.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya dokumentasi iklan layanan masyarakat pajak PBB. Dilaksanakan Oleh CV. CAKRAWALA CREATIVE Jl. Kyai Parseh No. 41 Malang.

5) Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang Pajak Daerah

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 340,223,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.185,688,950.00 atau 54.58%.

- 1 Paket Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Cleansing dan Penghapusan Piutang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 91.752.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.623.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penghapusan piutang dan berkurangnya piutang pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. GEOSPASIA WAHANA JAYA D'Spring Of Tomorrow Spring Park No.12 Kedungturi Taman Sidoarjo.

6) Kajian sensus pajak daerah

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 152.742.500.00 dengan realisasi sebesar Rp.133,820,000.00 atau 87.61%.

- 1 Paket pengadaan jasa konsultansi penelitian. Alokasi anggaran sebesar Rp. 129.882.500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.490.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kajian kegiatan sensus penelitian pajak daerah. Dilaksanakan oleh KOP INTI KESEJAHTERAAN Jl. Surabaya no.3 A Malang.

7) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.792,257,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.686,467,500.00 atau 86.65%.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- 175 buah belanja bahan perlengkapan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.875.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.350.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya perlengkapan tas ransel, etos kerja yang tinggi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dilaksanakan oleh CV. TUJUH MENARA Jl. Danau Bratan G5/i-17 RT.6/RW.7 Sawojajar Malang.
- 200 buah belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 70.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pakaian olah raga. Dilaksanakan oleh CV. DUTA PRIMA TEKNIK Jl. Raya Pandanlandung RT.13/RW.03 Ds. Pandanlandung Wagir Kabupaten Malang.
- 1 Paket Belanja Jasa Dekorasi/Dokumentasi pembuatan Company Profile Dinas Pendapatan Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.980.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya Company Profil di Dinas Pendapatan Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. HYPNO CREATIVE MEDIA Jl. Selat Sunda IV D4-50 Malang.
- 1 Paket kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 792.257.500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 546.810.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya kualitas pegawai pengelola pajak daerah dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh PT SINERGI PAKARYA SEJAHTERA Jl. Jend. Sudirman Jakarta.

8) Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.297,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.270,338,600.00 atau 90.87%.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- 27.963 lembar, 750 eksp belanja penggandaan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.592.600.00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.342.600.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya belanja penggandaan. Dilaksanakan oleh CV. DC GLOBALINDO Jl. Simp. Pakisaji No. 08 RT.10/RW.02 Ds. Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- 1 Paket kegiatan sewa ruang rapat pertemuan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 107.613.400.00 dengann realisasi sebesar Rp. 107.250.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemahaman akan kewajiban membayar pajak semakin meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. MITRA ANUGRAH JAYA Jl. Letj. Sutoyo 32 RT.03 RW.04 Rampal celaket Malang.
- 11 Jenis belanja alat tulis kantor kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 26.406.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.142.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya bahan alat tulis kantor untuk kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak daerah. Dilaksanakan oleh CV. CAHAYA MULYA Jl. Ranugrati III/45 Malang.

9) Gebyar Sadar Pajak

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.549,250,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.540,705,500.00 atau 98.44%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1 paket Jasa Penyelenggaraan Event dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.750.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 186.780.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyelenggaraan event gebyar sadar pajak. Dilaksanakan oleh CV CREATIVE PRO SEMUA Perum Permata Regency Blok. 24 No. 22 Karangploso Kabupaten Malang

- 450 makan dan minum (prasmanan), 500 Snack dan Minuman (orang) dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya makan minum rapat. Dilaksanakan oleh UD. RADHIZ Jl. Wahidin No. 60 Malang.
- 8 Unit pengadaan hadiah sepeda motor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 101.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 97.680.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya hadiah sepeda motor kegiatan gebyar sadar pajak. Dilaksanakan oleh PT. RODA SAKTI SURYA MEGAH Jl. Basiki Rahmad 40-42 Malang.
- 53 jenis belanja jasa dekorasi /dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.157.500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.228.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya dekorasi/dokumentasi kegiatan gebyar sadar pajak. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayjen Panjaitan 2C Malang.
- 2 Unit pengadaan hadiah mobil. Alokasi anggaran sebesar Rp. 174.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 173.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu tersedianya Hadiah mobil kegiatan gebyar sadar pajak . Dilaksanakan oleh CV. BAROKAH JAYA Dsn Srigading Ds Randuagung Kec. Tajinan Kabupaten Malang.

10) Kegiatan pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.400,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 168.150.000.00 atau 42.04%

- 1 Paket kegiatan pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan aplikasi/pengembangan dan pembangunan. Dilaksanakan oleh PT. SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI Jl. Kalibata Raya No. 11-12 B Jakarta selatan.

11) Kegiatan supervisi, pendampingan dan pengembangan pajak online pajak daerah

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.890.000.00 atau 65.93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Paket kegiatan pengadaan jasa konsultasi supervisi, pendampingan dan pengembangan pajak online. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya program pendampingan juga pengembangan pajak online yang dimaksud. Dilaksanakan oleh CV. SINERGI PERSADA UTAMA Perum Riverside D632 Blimbing Malang.

12) Pemilihan Putra-putri Gatra Pajak Daerah

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.170,963,500.00 atau 94.98%.

- 1 Paket Kegiatan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.450.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan pemilihan Putra Putri Gatra Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. MITRA ANUGRAH JAYA Jl. Letj. Sutoyo 32-34 Malang.
- 1 Paket belanja makan minum tamu kegiatan pemilihan putra-putri gatra pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.070.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.070.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya makan dan minum tamu pemilihan putra-putri gatra pajak. Dilaksanakan oleh UD. RADITZ Jl. Dr. Wahidin No.55 Kalirejo Lawang.
- 1 paket pengadaan main rapat kegiatan gebyar sadar pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.00 dengan realisasi Rp. 30.000.000.00.

13) Kajian Penetapan Target Pajak Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.48,594,000.00 atau 97.19%.

- 1 Paket Pengadaan Jasa Perencanaan Kajian Penetapan Target. Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.350.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.274.000.00. Hasil Keluaran dari kegiatan ini berupa Kajian Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah hasil kajian lebih besar dari target, sehingga dilakukan program sadar pajak pada Wajib Pajak. Dilaksanakan oleh CV. CITIPLAN Jl. Raya Tlogomas III/26 RT.001 RW.006 Malang.

14) Intensifikasi penerimaan PBB

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.3,138,343,450.00 dengan realisasi sebesar Rp.2,914,114,300.00 atau 92.86%.

- Belanja cetak SPPT. Alokasi anggaran sebesar Rp. 162.022.500.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 160.406.250.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya cetak SPPT dan tercapainya target penerimaan PBB. Dilaksanakan oleh CV. KARANG PANDEGA Jl. Klayatan III/14, RT.02/RW.02 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang.
- 5 jenis pengadaan Barang cetakan Tahap I. Alokasi anggaran sebesar Rp. 713.660.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 672.493.750.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya jenis barang cetakan. Dilaksanakan oleh CV. PUTRI HARAPAN Jl. Pelabuhan Ratu No. 134 Malang.
- 300 buah belanja jasa dekorasi/dokumentasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya spanduk PBB di kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. ESAS SIGITIKMA Jl. Baturetno No. 62 RT.05/RW.02 Ds. Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang.
- 1 paket belanja jasa penyelenggaraan event. Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.00 realisasi sebesar Rp. 49.390.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan penyelenggaraan event tax go to school. Diselenggarakan oleh CV. CREATIVE PRO SEMUA Perum Permata Regency Blok 24 No. 22 RT.01/RW.12 Ds. Ngijo Kec. Karang Ploso Kabupaten Malang.
- Belanja makanan dan minuman evaluasi PBB Tahap I. Alokasi anggaran sebesar Rp. 39.300.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00. Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya mamin rapat PBB tahap I. Dilaksanakan oleh CV. MAJU MAPAN Dsn. Krajan RT.02/RW.04 Ds. Bunut Wetan Kabupaten Malang.
- 1 paket belanja pengadaan hadiah Tahap I. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.600.000.00.

Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya hadiah sembako. Dilaksanakan oleh CV. EL MAIN JAYA Jl. Nakula 43 Tumpang Kabupaten Malang.

- 77 jenis belanja alat tulis kantor Tahap I. Alokasi anggaran sebesar Rp. 173.888.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.355.950.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu lancarnya pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. SENDANG TIRTA ABADI Perum Bukit Hijau B-29 Tlogomas Malang.
- 3 Jenis Belanja Modal perlengkapan penunjang sarana kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.455.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya perlengkapan penunjang sarana kantor di Dinas Pendapatan Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. OSA Jl. Teluk Etna II/15 Malang.
- 1 Paket Belanja Jasa Penyelenggaraan Event Tax Go To School. Alokasi anggaran sebesar Rp. 159.632.950.00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.500.000.00. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan penyelenggaraan event tax go to school. Dilaksanakan oleh CV. ANUGERAH SUKSES ABADI Jl. Jepara X/29 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.
- 1 Paket belanja jasa konsultasi pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi obyek pajak. Alokasi anggaran sebesar Rp. 99.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 90.860.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu maksimalnya sistem manajemen informasi obyek pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV PIRAMIDAA TEKNOLOGI INFORMASI Ruko Taman Bangunan Indah b36 Bungurasih Kec. Waru Surabaya.

15) Pemeriksaan Pajak Daerah Kota Malang

Alokasi anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp.629,976,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.522,235,100.00 atau 82.90%. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mengukur tingkat kejujuran wajib dalam pengisian SPTPD, serta menjangking wajib pajak yang bandel.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- 1000 brosur, 1.450 stiker, 100 spanduk, 1.250 stiker kecil. Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.437.500.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dilaksanakan oleh CV. AA Jl. Mayjen Panjaitan 2C Malang.
- 7 jenis pengadaan belanja hadiah. Alokasi anggaran Rp. 133.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.750.000.00. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersedianya pengadaan barang hadiah. Dilaksanakan oleh CV. NARIMO Jl. Taman Embong Anyar II Blok H-16 Mulyoagung Kec. Dau Kabupaten Malang.

16) Pengelolaan Benda-Benda Berharga

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.44,557,300.00 atau 80.28%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan pengendalian benda-benda berharga. Sedangkan hasilnya adalah terwujudnya pengendalian benda-benda berharga

17) Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.46,119,800.00 atau 83.10%.

Keluaran dari kegiatan ini berupa 12 Laporan Realisasi Pajak Daerah dan 15 buku kendali pajak, sehingga terwujudnya Laporan Realisasi Pajak Daerah kota Malang secara berkala. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya laporan realisasi pajak daerah Kota Malang.

18) Kajian Administrasi Pajak Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.198,425,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.178,848,000.00 atau 90.13%.

Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan output berupa 5 Peraturan (1 Perda dan 4 Perwal). Sehingga outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman dan ketentuan Produk Hukum tentang Pajak Daerah.

e. PROGRAM PELAKSANAAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN STANDAR MANAJEMEN MUTU

1) Survalance Audit ISO 9001-2008

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.100,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.93,997,000.00 atau 94.00%.

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 yaitu Jasa Konsultan Pemeliharaan 1 paket senilai Rp.50.400.000,00 dan Jasa konsultan Audit Eksternal senilai Rp.44.379.000,00. Dilaksanakan oleh CV. ORBIT NUSANTARA (konsultan bisnis dan management yang beralamat di jl. Letj. Hariyono no.54 gondanglegi Malang) Telp. 0341-5488809. Jasa Konsultan Pemeliharaan 1 paket senilai Rp. 50.400.000.00 dilaksanakan oleh CV. GLOBAL MEDIA SOLUTION Jl. Simp. Pakisaji No.4 Kab. Malang.

Alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.100,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.125.000.00 atau %. Dan realisasi sebesar Rp. 48.906.000.00 atau %.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu Terauditnya penerapan ISO 9001-2008 oleh Auditor Eksternal dan konsultansi pemeliharaan ISO 9001-2008.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kota merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2015 termasuk kategori **SANGAT BERHASIL**. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah direncanakan.

Malang, 08 Pebruari 2016



**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19681017 199203 1 006



LAMPIRAN